

STRATEGI PENINGKATAN PERAN SWASTA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

19

Eka Budiyaniti

Abstrak

Saat ini pemerintah sedang gencar melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah sebagai upaya pemerataan ekonomi. Namun, biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur tersebut tidak sedikit. Sumber dana dari pemerintah tidak cukup, sehingga dibutuhkan peran swasta untuk ikut serta membiayai pembangunan infrastruktur. Namun, di satu sisi swasta masih enggan melakukan investasi di bidang infrastruktur karena belum adanya kepastian mengenai perencanaan, aturan, dan skema pembiayaan, serta kendala utama dalam hal pembebasan lahan dan perizinan. Tulisan ini menganalisis strategi untuk meningkatkan peran swasta dalam pembangunan infrastruktur. Dengan mengacu pada kendala yang dihadapi selama ini, maka strategi yang dirumuskan antara lain adalah meningkatkan koordinasi antarpemangku kepentingan, meningkatkan kualitas perencanaan proyek, kemudahan dalam regulasi terkait pembebasan lahan dan perizinan, insentif fiskal, meningkatkan jaminan pemerintah terhadap swasta, dan skema pembiayaan infrastruktur yang lebih efektif. Diharapkan strategi-strategi tersebut dapat memberikan kepastian kepada swasta sehingga swasta dapat ikut serta berperan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Pendahuluan

Saat ini pemerintah sedang mendorong pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing Indonesia yang selama ini cukup tertinggal dibanding negara berkembang di kawasan lainnya. Arah kebijakan pembangunan infrastruktur tersebut tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Pembangunan infrastruktur yang masif ini membutuhkan biaya

yang tidak sedikit. Berdasarkan data Kementerian PPN/Bappenas, total nilai investasi yang dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur tahun 2015-2019 sebesar Rp4.796,2 triliun. Dari jumlah tersebut, pendanaan dari APBN dan APBD sebesar Rp1.978,6 triliun (41,3%) dan BUMN sebesar Rp1.066,2 triliun (22,2%), sehingga dibutuhkan pendanaan dari swasta sebesar Rp1.751,5 triliun (36,5%). Pada tahun 2015, realisasi anggaran



infrastruktur yang berasal dari APBN hanya mencapai Rp290 triliun, tahun 2016 Rp313,5 triliun, dan tahun 2017 Rp346,6 triliun. Angka tersebut masih jauh dari biaya yang dibutuhkan, mengingat masih ada beberapa capaian infrastruktur yang belum tercapai. Hal ini mendorong pemerintah untuk lebih meningkatkan peran swasta dalam pembangunan infrastruktur.

Pada tahun 2018, *International Monetary Fund* (IMF) melakukan asesmen terhadap perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2017. Dari hasil asesmen tersebut, IMF mengapresiasi progres yang telah dicapai Indonesia dalam meningkatkan investasi di bidang infrastruktur. Akan tetapi, IMF menyatakan laju pengembangan infrastruktur harus diimbangi dengan ketersediaan pembiayaan dan kapasitas penyerapan perekonomian. IMF juga menekankan pentingnya meningkatkan peran swasta dalam pembiayaan infrastruktur. Salah satu alasannya adalah untuk mengurangi beban keuangan APBN dan BUMN.

Oleh karena itu, dalam menghadapi keterbatasan biaya infrastruktur yang dimiliki, pemerintah sangat membutuhkan peran swasta untuk ikut serta membangun infrastruktur di Indonesia. Selama ini, swasta menghadapi berbagai macam kendala dalam investasi di bidang infrastruktur terutama dalam hal pembebasan lahan dan perizinan. Untuk menarik minat swasta, tulisan ini akan merumuskan strategi yang diharapkan dapat meningkatkan peran swasta dalam pembangunan infrastruktur.

Peran Swasta dan Kendala yang Dihadapi

Infrastruktur merupakan faktor penting dalam aktivitas

perekonomian yang dapat mengurangi efek jarak antardaerah, integrasi pasar nasional dan biaya rendah. Selain itu, infrastruktur juga memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan. Terkait hal tersebut, dibutuhkan dana yang sangat besar untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang menyeluruh dan berkesinambungan. Namun, kemampuan pemerintah untuk menyediakan dana pembiayaan infrastruktur tidak cukup besar. Oleh karena itu, masih dibutuhkan peran swasta untuk menutup *financial gap* tersebut melalui berbagai skema Kemitraan Pemerintah dengan Swasta (KPS) atau *Public Private Partnership* (PPP) serta Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Menurut Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Yusid Toyib, selain dapat mengisi *financial gap*, peran swasta juga memiliki berbagai keuntungan seperti dapat mendorong lebih tingginya *quality of service* proyek yang dihasilkan, dapat diterapkannya prinsip efisiensi sesuai *value for money*, dan lebih efektifnya tata kelola proyek infrastruktur terkait *performance accountability*.

Di Indonesia, keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur masih rendah. Berdasarkan data *Private Participation Infrastructure* (PPI) oleh *World Bank*, keterlibatan perusahaan swasta nasional Indonesia di bidang infrastruktur baru sebesar 2%. Jauh sekali jika dibandingkan dengan Filipina yang 44% proyek infrastrukturnya melibatkan swasta.

Pembangunan infrastruktur saat ini sudah berjalan selama 3

tahun. Sampai pertengahan tahun 2017, setidaknya 13% proyek infrastruktur telah selesai. Dari total 225 yang ditargetkan selesai pada tahun 2019, tercatat 30 proyek selesai. Progres paling maju adalah pembangunan bendungan yang mencapai 49,2%. Selanjutnya diikuti dengan pembangunan bandara (33,3%), infrastruktur listrik (31%), pembangunan jalan tol (26,8%), pelabuhan (18,3%), dan jalur kereta api (15%) (Gambar 1). Proyek yang belum selesai masih berada pada proses konstruksi dan proses lelang. Selain itu, ada juga yang masih dalam tahap persiapan awal.

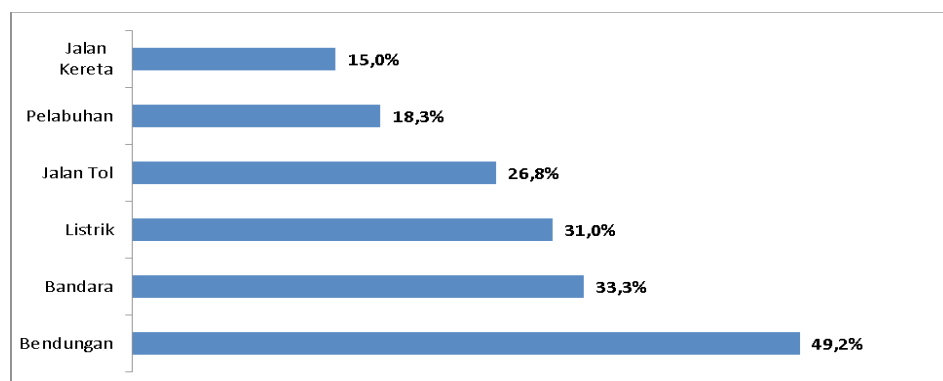
Lambatnya pembangunan infrastruktur tersebut disebabkan adanya kendala di berbagai tahapan proyek, mulai dari persiapan sampai implementasi. Secara keseluruhan, koordinasi antarpemangku kepentingan masih kurang, sehingga mengakibatkan mundurnya pengambilan keputusan. Pada tahap persiapan, masalah timbul akibat lemahnya kualitas penyiapan proyek dan alokasi pendanaan yang terbatas.

Selanjutnya, proyek juga terkendala dengan adanya masalah pengadaan lahan yang berakibat pada tertundanya pencapaian

financial close untuk proyek KPBU. Selain itu, dari sisi pendanaan sering muncul masalah terkait tidak tersedianya dukungan fiskal dari pemerintah akibat ketidaksesuaian pembagian risiko antara pemerintah dan badan usaha. Selain dukungan fiskal, keterbatasan jaminan pemerintah yang dapat diberikan pada proyek infrastruktur juga menurunkan minat investasi di Indonesia.

Strategi Peningkatan Peran Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur

Mengingat kebutuhan pembiayaan infrastruktur yang besar dan adanya kendala yang menyebabkan lambatnya progres pembangunan infrastruktur, maka perlu dirumuskan strategi untuk meningkatkan peran swasta dalam pembangunan infrastruktur. Adapun strategi yang *pertama* adalah meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan *stakeholder* lainnya. Hal ini perlu segera dilakukan karena masalah minimnya koordinasi menjadi salah satu kendala yang kerap terjadi dalam proses pembangunan



Sumber: Databoks, Katadata Indonesia, 2017.

Gambar 1. Progres Pembangunan Infrastruktur Berdasarkan Jenis

infrastruktur. Pemerintah pusat harus menjembatani permasalahan koordinasi ini agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan dengan baik.

Kedua, meningkatkan kualitas perencanaan proyek. Pemerintah perlu membuat perencanaan proyek yang efektif dan efisien termasuk alokasi anggaran di dalamnya. Selain itu juga diperlukan kajian persiapan proyek untuk meningkatkan kelayakan suatu proyek, sehingga diharapkan swasta tertarik untuk melakukan investasi.

Ketiga, memberikan kemudahan dalam regulasi terkait pembebasan lahan dan perizinan. Selama ini, masalah terbatasnya lahan dan pembebasan lahan menjadi faktor penghambat utama dalam pembangunan infrastruktur. Selain itu, perlu adanya upaya pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendukung pengadaan tanah yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Dalam hal perizinan, masalah yang dihadapi adalah lamanya proses perizinan. Karenanya, pemerintah juga perlu meringkas atau memotong proses perizinan tersebut sehingga lebih efektif dan efisien. Saat ini pemerintah sudah mulai memangkas regulasi perizinan dan birokrasi panjang tersebut. Hal ini perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan kembali oleh pemerintah untuk menarik minat swasta.

Keempat, memberikan insentif fiskal. Insentif fiskal memiliki daya tarik tersendiri bagi swasta untuk berinvestasi. Hendaknya insentif fiskal yang diberikan oleh

pemerintah kepada swasta, lebih terukur dan berkualitas. Insentif fiskal yang diberikan kepada swasta antara lain dapat berupa keringanan pajak dan bea masuk serta kepabeanan lainnya.

Kelima, meningkatkan jaminan pemerintah terhadap swasta. Jaminan perlindungan yang diinginkan swasta adalah payung hukum agar swasta mendapatkan hak yang sama dengan BUMN dalam melaksanakan proyek yang dianggap layak (*feasible*) secara ekonomi.

Dan strategi terakhir yang perlu dilakukan pemerintah adalah, skema pembiayaan infrastruktur yang lebih efektif. Skema pembiayaan infrastruktur harus bisa menguntungkan masing-masing pihak. Selain itu, struktur, hak dan kewajiban masing-masing pihak juga harus jelas. Guna menarik minat dan peran swasta melalui skema KPBU, pemerintah memberikan fasilitas kepada swasta berupa dukungan kelayakan (*viability gap fund*) dan insentif perpajakan, jaminan pemerintah, dan pembayaran atas kesediaan layanan kepada badan usaha.

Mengingat masalah terbesar dalam pembangunan infrastruktur adalah pengadaan lahan, maka dari beberapa strategi yang sudah dikemukakan, strategi kemudahan dalam regulasi terkait pembebasan lahan harus segera dilakukan dalam jangka pendek. Pemerintah harus cepat menyelesaikan permasalahan pembebasan lahan, karena jika terus menghambat maka pembangunan infrastruktur juga tidak akan berjalan. Masalah pengadaan lahan juga menjadi isu yang krusial karena menyangkut lahan

masyarakat. Pemerintah hendaknya juga berhati-hati dalam membuat aturan atau kebijakan dalam pengadaan lahan agar masyarakat juga tidak merasa dirugikan dengan adanya pembangunan infrastruktur.

Penutup

Pemerintah memiliki komitmen kuat untuk menciptakan ekonomi yang stabil dengan pertumbuhan ekonomi inklusif. Melihat tujuan ini, maka investasi utamanya dalam memperbaiki sektor pembangunan infrastruktur harus ditingkatkan. Keterbatasan dana pembangunan infrastruktur yang dimiliki pemerintah menyebabkan dibutuhkan peran swasta yang diharapkan dapat mengisi *financial gap* dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur. Mengingat pentingnya peran swasta tersebut, maka diperlukan strategi yang dapat meningkatkan peran swasta. Dengan demikian diharapkan strategi tersebut dapat menarik swasta berinvestasi di bidang infrastruktur. Peran DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan mengawal program dan kebijakan pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan, terutama dalam hal pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur. DPR juga harus melindungi hak rakyat yang lahannya digunakan untuk pembangunan infrastruktur agar tidak merasa dirugikan.

Referensi

“Bagaimana Progres Pembangunan Infrastruktur di Indonesia?”, [*bagaimana-progres-pembangunan-infrastruktur*, diakses 19 Februari 2018.](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/06/09/</p></div><div data-bbox=)

Hanafiah Ponggawa & Partners, “Menarik Minat Swasta dalam Proyek Pembangunan Infrastruktur”, http://hprplawyers.com/wp-content/uploads/2014/12/20171207_Regulasi-dan-Kebijakan-Pemerintah-untuk-Menarik-Minat-Swasta_.pdf, diakses 19 Februari 2018.

Himawan, A., “Peran Swasta Dalam Pembangunan Infrastruktur Didorong”, <https://www.suara.com/bisnis/2016/12/11/082448/peran-swasta-dalam-pembangunan-infrastruktur-didorong>, diakses 19 Februari 2018.

Idris, M., “Swasta Diajak Bangun Infrastruktur, Tapi Ada Kendala Koordinasi Pusat dan Daerah”, <https://finance.detik.com/wawancara/3333014/swasta-diajak-bangun-infrastruktur-tapi-ada-kendala-koordinasi-pusat-dan-daerah>, diakses 14 Februari 2018.

“Infrastruktur: Peranan dan Problematikanya”, KPPOD Brief Edisi Sept-Okt 2012.

Novalius, F., “Sri Mulyani Ajak Swasta Tingkatkan Kualitas Infrastruktur Indonesia”, <https://economy.okezone.com/read/2018/02/07/320/1856050/sri-mulyani-ajak-swasta-tingkatkan-kualitas-infrastruktur-indonesia>, diakses 14 Februari 2018.

“Perkembangan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia”, <https://kppip.go.id/tentang-kppip/perkembangan->

pembangunan-infrastruktur-di-indonesia/, diakses 14 Februari 2018.

Prakoso, J. P., "Ini yang Diperlukan untuk Meningkatkan Peran Swasta di Proyek Infrastruktur", <http://industri.bisnis.com/read/20180204/98/734138/ini-yang-diperlukan-untuk-meningkatkan-peran-swasta-di-proyek-infrastruktur>, diakses 13 Februari 2018.

Setiawan, S.R.D., "IMF: Swasta dan Asing Perlu Diberi Peran Lebih Besar dalam Pembiayaan Infrastruktur", <http://ekonomi.kompas.com/>

read/2018/02/07/162254326/imf-swasta-dan-asing-perlu-diberi-peran-lebih-besar-dalam-pembiayaan, diakses 13 Februari 2018.

Setijadi, "Rekomendasi untuk Menarik Minat Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur Transportasi", <http://supplychainindonesia.com/new/rekomendasi-untuk-menarik-minat-swasta-dalam-pembangunan-infrastruktur-transportasi/>, diakses 13 Februari 2018.



Eka Budiyanti
eka.budiyanti@dpr.go.id

Eka Budiyanti, S.Si., MSE., menyelesaikan pendidikan S1 Matematika Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2006 dan pendidikan Magister (S2) Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia Depok pada tahun 2008. Saat ini menjabat sebagai peneliti muda bidang kepakaran Ekonomi Terapan pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Analisis Daya Saing *Crude palm Oil* (CPO) Indonesia" (2016), Kebijakan Liberalisasi Perdagangan: Dampak dan Perspektifnya dalam Mendukung Perekonomian Nasional" (2016), dan "Dampak Liberalisasi Perdagangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia" (2017).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.